

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang terletak di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan. Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang menjadikannya suatu kepulauan. Tokyo secara *de facto* adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan termasuk dalam urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja (Lintangsari, 2019).

Jepang merupakan salah satu negara yang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II pada tahun 1945. Amerika Serikat kemudian mengakhiri perlawanan Jepang dengan cara menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang kemudian membuat Jepang memasuki periode pendudukan Amerika Serikat (Dasuki, 1963, hal.). Kebijakan Amerika Serikat di Jepang selama masa pendudukannya yaitu pertama, menghancurkan militer yang menjadi penyebab perang; kedua, mengadili pejabat-pejabat perang; ketiga, membersihkan para pemimpin yang telah terbukti bertanggung jawab atas politik

agresi; keempat, mengatasi pembayaran ganti rugi perang; kelima, penghancuran industri perang dari perampasan alat-alat perang; keenam, pendemokrasian politik, ekonomi dan pendidikan di Jepang. Hal ini menambah kesengsaraan Jepang, yang berakibat pada muncul permasalahan-permasalahan dan kekacauan dalam berbagai bidang (Dasuki, 1963).

Reformasi perpolitikan dan perekonomian Jepang yang terjadi setelah adanya Reformasi Meiji, dan kebangkitan Jepang paska kekalahan di Perang Dunia II telah membawa Jepang menjadi salah satu kekuatan dunia yang baru. Hal ini terlihat dengan semakin aktifnya Jepang dalam kancah hubungan internasional. Jepang turut aktif untuk menjaga perdamaian. Pada bulan Oktober 1956, Jepang mulai menjalin hubungan diplomatik dan penandatanganan pakta perdagangan dengan negara-negara liberal. Kemudian pada bulan Desember 1956, Jepang resmi masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jepang juga bergabung dengan kelompok negara-negara industri utama dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 1964 (Soesatro, 1990). Keaktifan Jepang lainnya juga tercermin dengan masuknya Jepang ke dalam beberapa organisasi internasional seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 1989, Association of South East Asia Nations (ASEAN), dan The Group of Twenty (G20) (Zakky, 2017). Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika (Lintangsari, 2019).

Setelah berakhirnya era Perang Dunia II, Jepang berhasil meningkatkan pertumbuhannya melalui kerjasama pada bidang Industri dengan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena Jepang menyadari bahwa paska kekalahan perang yang dialaminya, hal utama yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah meningkatkan perekonomiannya. Jepang melakukan beberapa strategi untuk kembali bangkit dari kekealahannya, diantaranya membuka diri dengan negara

lain melalui kerjasama. Kerjasama yang dilakukan Jepang telah berimplikasi dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang industry. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi, berupa teknologi informasi dan komunikasi yang banyak diminati oleh masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Produk-produk Jepang mulai merajai dunia internasional dan bahkan dapat bersaing dengan produk-produk industri yang ada di negara maju. Jepang menyebut tahun 1964 sebagai tahun keemasan atau *golden years*. Hasil yang dicapai menjadikan Jepang sebagai negara yang memiliki perekonomian luar biasa. Ikeda Hayato yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang tahun 1960-1964, mengumumkan bahwa Jepang akan menjadi salahsatu negara kaya dan maju. Selama periode ini, Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang meningkat dari US\$ 44,31 miliar dengan pendapatan per kapita US\$ 479 pada 1960 menjadi US\$ 172,2 miliar dengan pendapatan per kapita US\$ 1.669,1 pada 1969 (Agung, 2018).

Upaya Jepang untuk menjaga pertumbuhan ekonominya dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, dengan melibatkan kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Dalam kerjasamanya dengan banyak blok-blok perjanjian perdagangan bebas yang ada di wilayah International, salah satunya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), yang kemudian membuat Jepang ingin bergabung dalam perjanjian kerja sama ekonomi lainnya yaitu Perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Bergabungnya Jepang dalam TPP memiliki harapan agar dapat memperkuat pertumbuhan ekonominya. Perjanjian ini berawal dari perjanjian perdagangan khusus yang bernama *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP) yang berawal pada saat forum ekonomi antara 21 negara anggota APEC yang dilangsungkan pada tahun 1990-an oleh 5 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Singapura, Chile, dan Selandia Baru. Kelima negara tersebut melakukan perundingan informal yang membahas tentang pembuatan kerjasama

perdagangan di kawasan Asia Pasifik (Elms, 2012). *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan kerjasama berstandar tinggi yang berusaha untuk menghapus biaya pajak untuk perdagangan barang, jasa, dan pertanian, serta membangun dan memperluas peraturan yang membahas mengenai berbagai masalah termasuk hak kekayaan intelektual, inversasi asing, dan isu-isu mengenai perdagangan lainnya. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) bertujuan untuk meliberalisasi ekonomi kawasan Asia-Pasifik. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dilihat sebagai alat Amerika Serikat demi kepentingan perdagangan dan keamanan Amerika Serikat, namun disisi lain *Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah ancaman bagi China di wilayah Asia-Pasifik.

Negara-negara di Asia sedang dalam proses mengkaji ataupun memperdebatkan tentang pembuatan keputusan, apakah akan bergabung dengan kerjasama atau tidak seperti halnya negara anggota yang sedang mengkaji permasalahan ratifikasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP) (Elms, 2012). Banyak analisis yang berpendapat, negara yang pasti akan bergabung adalah Korea Selatan dan Kolombia, mengingat saat ini kedua negara tersebut terlibat perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat. Beberapa negara seperti Indonesia, Korea Selatan, Filipina, dan juga Thailand telah menyatakan untuk secara terbuka berminat bergabung setelah perundingan kedua pasca *Trans-Pacific Partnership* (TPP) diratifikasi. Taiwan juga telah menyatakan minatnya untuk bergabung dalam keanggotaan. Jika negara besar di Asia dan Taiwan bergabung, maka pengaruh *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di kawasan Asia Pasifik akan semakin besar. Kerjasama *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat memberikan perubahan politik domestik suatu negara dengan mendorong agenda domestik untuk melancarkan akses perdagangan beberapa negara yang berkembang ke pasar Amerika Serikat. Selain itu, dapat juga menjadi implementasi tujuan Amerika Serikat tentang hak-hak pekerja internasional, perlindungan lingkungan dan pembatasan perdagangan spesies langka.

Jepang pun dihadapkan dilema antara memilih untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan membuka pasarnya secara bebas atau tetap mempertahankan kebijakan proteksionismenya. Meskipun demikian, hingga akhir dinyatakan persetujuan mengenai *Trans-Pacific Partnership* (TPP), Jepang masih teguh mempertahankan kebijakan proteksionismenya, terutama di bidang agrikultur. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sektor pertanian Jepang sangat dilindungi, di antaranya adalah semakin meningkatnya penduduk Jepang, sehingga memerlukan semakin banyak kebutuhan pangan dan semakin menyempitnya lahan pertanian karena adanya industrialisasi (Harada, 2013). Amerika Serikat sebagai negara yang telah mengajak Jepang untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) kemudian memutuskan untuk keluar dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Karena adanya pergantian kepemimpinan yang semula dipimpin oleh Obama dan sekarang pada kepemimpinan baru digantikan oleh Donald Trump. Padahal, selama pemerintahan Presiden Barack Obama, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) merupakan kesepakatan perdagangan untuk mengikat mitra dan aliansi perdagangan Amerika Serikat untuk menandingi ekspansi China. Sebanyak 12 anggota TPP merepresentasikan 40% ekonomi dunia. Serta pada kepemimpinan Presiden Barack Obama, Amerika menjadi negara yang terus mendorong keikutsertaan Jepang untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Sebelumnya Trump telah menyatakan bahwa pada kampanyenya, apabila dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, dia akan menarik Amerika Serikat dari perjanjian dagang regional *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Dalam pandangan Trump ini menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan Amerika Serikat, karena terjadinya peningkatan pengangguran. Trump berjanji untuk mengadakan renegotiasi Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau dikenal dengan *North American Free Trade Agreement* (NAFTA)

dengan Meksiko dan Kanada. Keputusan eksekutif Trump tentang *Trans-Pacific Partnership* (TPP) sebenarnya adalah simbolik semata. Pasalnya, kesepakatan itu belum diratifikasi oleh Kongres Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik. Trump berulang kali menegaskan, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) berpotensi menimbulkan bencana bagi Amerika Serikat karena mengganggu perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Politikus Partai Demokrat Senator Bernie Sanders, mengatakan kepada BBC, dia mendukung keputusan Trump tersebut (Rai, 2017). Namun, Jepang tetap pada keputusannya untuk bergabung tepat pada tanggal 13 Maret 2013. Shinzo Abe mendeklarasikan niatan pemerintah untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan secara resmi diakui sebagai anggota *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ketika Jepang mengikuti perundingan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di Malaysia untuk pertama kalinya pada tanggal 23 – 25 Juli 2013. Putaran terakhir negosiasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP), 5 Oktober 2015 Jepang kemudian menyetujui untuk meningkatkan impornya tapi tetap membatasi impor bagi komoditas sektor agrikultur, yaitu beras (Office of the United States Trade Representative, 2015).

B. Rumusan Masalah

Mengapa Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan Jepang bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) meskipun Amerika Serikat berencana untuk keluar?

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Joshua Goldstein, kebijakan luar negeri adalah strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi mereka di dunia internasional (Goldstein, 2019). Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun

kolektifnya. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat mempengaruhi negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki prestise, serta *benefit* untuk negaranya. Mereka bertindak berdasarkan sumber daya yang ada. Dalam melihat model kebijakan luar negeri suatu negara, maka dapat dilihat berdasarkan level analisis yang akan membantu dari arah mana kebijakan tersebut dikeluarkan. Level analisis berjumlah tiga, di antaranya ialah:

- a. Kebijakan luar negeri yang dianalisis dari tingkat individu (pemimpin),
- b. Kebijakan luar negeri yang dianalisis dari tingkat domestik negara,
- c. Kebijakan luar negeri yang dianalisis dari tingkat sistem.

Salah satu hal yang paling sering digunakan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu '*Rational Decision-Making Model*' ada 3 model di dalamnya yaitu: *Rational Actor Model*, *Organizational Process Models* (OPM), dan *Bureaucratic political models* (BPM).

a. *Rational Actor Model*

Dalam model ini, digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif tersebut menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan tersebut digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu.

b. *Organizational Process Models* (OPM)

Dalam model ini, Graham T. Allison menjelaskan bahwa organisasi, dalam hal ini kementerian dalam pemerintah, dapat bergerak sendiri sebagai pengambil keputusan. *Organizational Process Models* (OPM)

menganggap tujuan dan sasaran dibentuk secara baik, membatasi pilihan, menggunakan standar operasional prosedur (SOP), membuka jalan pembuatan kebijakan yang dipengaruhi oleh organisasi-organisasi kunci atau lembaga dalam negara, setiap organisasi memiliki masing-masing fungsi dan misi. Serangkaian program dikembangkan demi mencapai tujuan tergantung pada anggaran (dana keuangan). Standar operasional prosedur (SOP) meningkatkan efisiensi dan kinerja, kepuasan yang dihasilkan lebih diutamakan daripada optimalisasi.

c. *Bureaucratic Political Models (BPM)*

Dalam model ini, menjelaskan bahwa unit analisisnya berdasarkan individu yang merupakan kunci pengambilan keputusan berdasarkan pengaruh Birokrasi, tokoh kunci memiliki pengaruh besar dalam menentukan tindakan birokrasinya. *Bureaucratic political models (BPM)* juga merupakan tindakan pemerintah: hasil dari proses tawar-menawar politik di antara pemain kunci, tawar-menawar, dan kompromi hasil dalam kepuasan tidak mengoptimalkan pengambilan keputusan: pemilihan berdasarkan dukungan dan birokrasi yang sukses melobi pemimpin, ambisi pribadi menjadi pertimbangan birokrasi yang sukses melobi pemimpin, ambisi pribadi menjadi pertimbangan birokrasi ketika membuat keputusan, permusuhan dan persahabatan terjadi antara birokrasi, serta pendapat pribadi tentang isu-isu yang terjadi, dapat menyimpang sesuai kebutuhan kebijakan publik yang seharusnya diambil.

Untuk menjelaskan pokok permasalahan di atas, maka saya menggunakan model aktor rasional. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintahan dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual dengan menerapkan penalaran yang

sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu. Seorang analisis dianggap sudah bisa menjelaskan suatu politik luar negeri kalau ia bisa menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sedang dipelajarinya itu merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa yang bersangkutan (Mohtar, 1994).

Model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”. Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model itu para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional. Oleh karena itu, menurut Allison, model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Memang, kalau kita mencoba menganalisis dan menjelaskan mengapa para pembuat keputusan di negeri lain itu melakukan sesuatu, cara paling mudah adalah berasumsi bahwa mereka rasional dan kemudian menempatkan diri kita dalam posisi mereka. Dalam keadaan ini, kita mencoba untuk mengetahui apa kira-kira tujuan mereka dengan melakukan tindakan tertentu itu. Dalam hal ini kita juga berasumsi bahwa

pemerintah negara lain itu monolit, tidak terpecah belah, dan bahwa kejadian penting pasti disebabkan oleh sesuatu yang penting juga (Mohtar, 1994).

Asumsi-asumsi tentang perilaku pemerintah yang monolit, perilaku menetapkan pilihan secara rasional dan bertujuan jelas itu dan asumsi tentang tersedianya informasi yang cukup dikritik oleh Allison karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Asumsi-asumsi itu mengabaikan fakta bahwa para pembuat keputusan itu adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan yang selalu menghadapi berbagai kendala eksternal dari birokrasinya sendiri, dari berbagai kelompok kepentingan, opini publik, dan sebagainya. Terutama dalam sistem demokrasi, politik luar negeri tidak pernah bisa terlepas dari tuntutan politik domestik.

D. Hipotesis

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan merujuk pada kerangka pemikiran di atas maka dapat diambil hipotesis Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan Jepang bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena:

1. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat memberikan peningkatan eksistensi ekonomi Jepang di wilayah Asia Timur.
2. *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dapat Meningkatkan investasi Jepang.

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan masuk dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Lalu dalam penelitian skripsi ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam membagi wawasan dan pengetahuan tentang bergabungnya Jepang dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).
2. Menambah pengetahuan umum di bidang ilmu sosial dan menerapkan teori atau konsep yang ada pada Ilmu Hubungan Internasional.
3. Sebagai bahan untuk perbandingan bagi penulis selanjutnya.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penelitian agar tidak menyimpang dari pembahasan dan memudahkan penulis untuk menganalisa. Penulis membatasi jangkauan penelitian ini kisaran rentang waktu 2003-2017. Pada tahun 2003 Perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dibuat, pada tahun 2013 di masa Pemerintahan Shinzo Abe secara resmi Jepang bergabung sebagai anggota TPP yang mana Amerika Serikat sebagai promotornya. Namun di 2017 Amerika Serikat resmi memutuskan mengundurkan diri dari kesepakatan perdagangan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

G. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul Latar Belakang Keputusan Perdana Menteri Shinzo Abe Masuk Dalam Keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Penulis menggunakan metode penulisan kualitatif. Metode penulisan kualitatif merupakan penelitian yang banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Selain itu metode ini juga memaparkan gejala-gejala yang diamati dan tidak harus berbentuk angka-angka dan berbentuk studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui sumber dari berbagai tempat.

Data terkait permasalahan yang penulis teliti diperoleh dari beberapa sumber yaitu artikel, buku, jurnal, koran, dan lainnya. Setelah data didapatkan, kemudian pada pembahasan penulis akan menganalisis penelitian ini dengan deskriptif analitik yaitu menjelaskan dan menganalisis data-data yang didapatkan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis mengenai alasan Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan masuk dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Kemudian penulis akan menghubungkan fenomena-fenomena yang satu dengan yang lainnya untuk menarik kesimpulan akhir dari penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun sistematika penulisan, untuk mendapatkan hasil yang jelas dan sistematis maka penulis memberikan urutan sebagai berikut.

BAB I adalah bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, kerangka teori yang akan menjadi acuan penulis dalam memahami masalah dalam penelitian ini, hipotesa sebagai dugaan sementara dalam penelitian ini, selain itu pada bab ini akan memuat metode penulisan, tujuan, dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II adalah bagian yang berisi tentang sejarah perkembangan perekonomian Jepang dan hubungan bilateral Jepang-Amerika Serikat dalam kerjasama ekonomi.

BAB III adalah bagian yang menjelaskan tentang terbentuknya *Trans-Pacific Partnership* (TPP), dan Proses bergabungnya Jepang dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

BAB IV adalah bagian isi dari penelitian yang akan membahas tentang pertimbangan Jepang untuk bergabung dalam keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP)

BAB V adalah bagian dari penutup penelitian ini. Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan proses analisis yang dilakukan oleh penulis.